

Hasil Penelitian

INOVASI SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH *STUNTING* DI LOMBOK BARAT

(*SOCIAL INNOVATION TO OVERCOME STUNTING PROBLEMS IN WEST LOMBOK*)

*Pajar Hatma Indra Jaya**, *Saptoni**, *Ahmad Izudin**, *Rahadiyand Aditya**,
*Saparwadi***, *Maryani****

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
Email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id

**Institut Elkatarie
Jl. Taman Sari, Banjar Sari, Labuhan Haji, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat - Indonesia

***Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, 55714
Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia

Diterima: 17 November 2022; Direvisi: 02 Oktober 2023; Disetujui: 04 Oktober 2023

ABSTRAK

Stunting masih menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Terdapat 100 Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah untuk penanganan stunting. Tidak semua program penanggulangan stunting berjalan dengan baik. Salah satu kota yang dinilai mampu untuk menyelesaikan masalah stunting dengan baik adalah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat yang mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Penelitian ini penting karena banyak daerah di Indonesia yang masih berjuang menemukan model penanganan stunting yang tepat. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pemerintah dan masyarakat Lombok Barat tentang upaya mengatasi stunting. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada faktor determinan yang menjadi penyebab stunting di Lombok Barat. Stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai aspek kesehatan, ekonomi, kesadaran, lingkungan-sanitasi, sampai budaya. Program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan bersyarat dari pemerintah pusat untuk warga miskin juga tidak mampu mengatasi stunting. Hal ini tercermin dari adanya keluarga-keluarga penerima bantuan, namun tetap mengalami stunting. Metode penanganan stunting di Lombok Barat dilakukan secara *topdown* lewat pengarusutamaan penanganan stunting dalam pembangunan. Hal itu dijalankan dengan mekanisme "paksaan" dari bupati kepada seluruh instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat satu program inovasi sosial yang ditujukan untuk mengatasi stunting. Hasilnya semua instansi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempunyai program dengan nama unik dan caranya masing-masing untuk mengatasi stunting. Pengarusutamaan akan memberikan pemahaman kepada semua pihak sehingga menjadikan stunting sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama. Sehingga angka stunting di Lombok Barat dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Kata kunci: stunting, pengarusutamaan program, inovasi sosial, kebijakan *top-down*, bantuan sosial

ABSTRACT

Stunting is still a social problem that the Indonesian government must resolve. The current government prioritizes one hundred districts to address the problem. Although not all stunting prevention programs run well, one district considered capable of solving the stunting problem well is West Lombok Regency. This research is essential because many regions in Indonesia are still struggling to find a suitable stunting management model. This study aims to find a model for handling stunting in this area to reduce stunting rates significantly. For this purpose, researchers conducted qualitative research by conducting interviews with the government and people of West Lombok in overcoming stunting. This study found no determinant factors that caused stunting in West Lombok. Stunting is influenced by many factors, from health, economy, people awareness, environment-sanitation, to culture. Social protection programs in the form of conditional assistance from the central government for the poor can also not overcome stunting. The existence of families receiving assistance but still experiencing stunting proves the above assumption. West Lombok government carried out the method of handling stunting in a top-down manner through mainstreaming stunting handling in government programs. The Regent put a "coercion" mechanism to all agencies within the West Lombok government to create a social innovation program to overcome stunting. As a result, all agencies in the West Lombok government have programs with unique names and ways to participate in reducing stunting. With this mainstreaming, everyone understands the problem of stunting and makes it a common problem that must be solved together so that the stunting rate in West Lombok has decreased significantly.

Keywords: *stunting, program mainstreaming, social innovation, top-down policy, social assistance*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang kaya raya, "tongkat kayu di tanam jadi tanaman". Negara Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mempunyai pusat keanekaragaman genetika (plasma nutfah) tanaman di dunia, khususnya untuk buah-buahan tropis dan berbagai tanaman pangan (Sumarno and Zuraida, 2008; Maryani *et al.*, 2019). Namun di tengah potensi kelimpahan pangan ini, *stunting* masih menghantui Indonesia.

Menurut Data Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022, prevalensi angka *stunting* di Indonesia masih di angka 21,6 persen, jumlah ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai 24,4%. Namun jumlah ini masih jauh dibandingkan target pemerintah untuk menurunkan *stunting* di angka 14% (Humas BKPB, 2023). Data di atas sungguh ironi karena Indonesia merupakan negara tropis yang potensial bisa menyediakan pangannya sendiri, namun angka *stunting*-nya termasuk yang tinggi. *Stunting* sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor.

Penelitian Farah Okky Aridiyah, Ninna Rohmawati, dan Mury Ririanty (2015) mengatakan bahwa penyebab *stunting* salah satunya gizi buruk dan tidak adanya makan (Aridiyah, Rohmawati and Ririanty, 2015). Namun untuk Indonesia kekurangan makan harusnya tidak sampai terjadi karena Indonesia merupakan negara agraris penghasil berbagai makanan dan buah. Indonesia merupakan negara yang menyimpan kekayaan akan lauk pauk dan sayur mayur yang bergizi.

Beberapa penelitian juga menghubungkan *stunting* dengan bencana (Dimitrova and

Muttarak, 2020; Edwards, Gray and Borja, 2021), namun tentu teori tersebut tidak bisa menjelaskan kondisi Indonesia meskipun Indonesia termasuk negara yang masuk wilayah *ring of fire*.

Dilihat dari budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia, sebenarnya fenomena *stunting* dianggap sebagai fenomena yang cukup mengherankan. Hal ini karena secara normatif orang Islam dan Indonesia tidak akan membiarkan saudaranya kelaparan. Hal ini didasarkan pada budaya dan juga agama yang diyakini. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang tidak peduli pada kelaparan dan kemiskinan dimasukkan sebagai orang yang mendustakan agama. Terdapat perintah keras dalam Al-Qur'an untuk memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan (Rodin, 2015).

Menurut kondisi sosiologi dan budaya masyarakat Indonesia, survey Charities Aid Foundation (CAF) *World Giving Index* tahun 2021 mengatakan bahwa orang Indonesia termasuk orang yang paling dermawan se-dunia (CAF, 2021). Oleh karena itu penting untuk memeriksa kira-kira apa penyebab *stunting* di Indonesia. Selain disebabkan karena ketiadaan pangan *stunting* juga bisa terjadi karena kemiskinan. Kondisi kemiskinan membuat anak-anak dari satu keluarga miskin mengalami *stunting*.

Penelitian yang berangkat dari argumen ini cukup banyak (Casapía *et al.*, 2006; Rizal and Doorslaer, 2019), namun jika kemiskinan sebagai faktor utama penyebab *stunting* pemerintah Indonesia mempunyai program bantuan sosial (jaminan sosial) untuk orang miskin. Ada juga penelitian yang menganggap bahwa kerangka berpikir yang salah menjadi

penyebab *stunting* (Ramadhan and Ramadhan, 2018; Muliani, Supiana and Hidayati, 2020; Salsabila, Putri and Damailia, 2021). Hal ini menyebabkan kemungkinan keluarga yang kaya (tidak miskin) juga ada yang menderita *stunting* karena kerangka berfikir yang tidak ada kesadaran untuk memberikan makanan yang bergizi.

Kondisi tersebut terjadi bukan karena tidak ada uang untuk makan, namun uangnya dialokasikan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih penting. Selain itu *stunting* juga disebabkan oleh karena faktor infeksi penyakit. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab *stunting*, namun secara umum *stunting* dapat terjadi karena faktor asupan gizi yang kurang, adanya infeksi, dan karakteristik berfikir orang tua (Ismawati *et al.*, 2020).

Pemerintah Indonesia mempunyai target untuk menurunkan angka *stunting* sampai 14 persen di tahun 2024 (BPMI Setpres, 2022). Untuk mencapai target tersebut pemerintah Indonesia membuat program prioritas penanganan *stunting* di 100 kabupaten/kota (TNP2K, 2017). Namun tidak semua lokasi mendapatkan hasil yang menggembirakan. Salah satu daerah yang mampu menurunkan *stunting* dengan baik adalah Kabupaten Lombok Barat.

Pada tahun 2013, angka *stunting* di Lombok Barat prevelensinya sampai 46.89%. Angka balita yang mengalami *stunting* mencapai 28.533 balita. Namun Lombok Barat secara bertahap mampu memperbaiki peringkat *stunting*-nya dan secara konsisten mampu untuk menurunkan laju *stunting* di daerahnya. Pemerintah Lombok Barat mampu merubah angka *stunting* dari 46.89% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018, dan 20,7% pada tahun 2022.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melihat bagaimana Pemerintah Lombok Barat mampu menyelesaikan persoalan *stunting*-nya? Perlu melihat intervensi atau inovasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Lombok Barat sehingga mampu keluar dari persoalan *stunting* secara bertahap. Temuan tersebut akan menjadi *lesson learned* yang berharga bagi banyak pemerintah daerah yang masih mempunyai masalah dalam menurunkan angka *stunting*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif untuk melihat penyebab dan langkah inovasi apa yang dilakukan Pemerintah Lombok Barat untuk mengatasi *stunting*. Lombok Barat diambil sebagai lokasi karena daerah ini pada awalnya mempunyai angka *stunting* yang tinggi, namun secara perlahan mampu membalikkan keadaan.

Penelitian dilakukan mulai Bulan September sampai November 2022. Pada bulan September dilakukan perencanaan dan pencarian dokumen dari berbagai sumber di internet terkait *stunting* dan penanganannya di Lombok Barat. Pada bulan Oktober dilakukan pengumpulan data dan di bulan November sampai Desember dilakukan penyempurnaan tulisan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Hendriasyah, 2013). Penentuan informan dilakukan dengan teknik bola salju (*snowballing*). Teknik bola salju dilakukan dengan mengambil satu orang informan kunci dari pegawai dinas kesehatan. Dari satu orang informan kunci kemudian peneliti mendapatkan nama-nama yang cocok untuk diwawancarai sehingga jumlah informannya meluas sampai ke masyarakat. Informan terdiri dari 12 orang, yaitu: 3 (tiga) orang pegawai dinas kesehatan, 4 (empat) orang perangkat desa, 1 (satu) orang kepala dusun, 4 (empat) orang kader kesehatan, dan 10 (sepuluh) orang warga yang putranya dinyatakan terkena *stunting*.

Wawancara ke masyarakat dilakukan di salah satu dusun yang menjadi kampung percontohan penanganan *stunting* di Lombok Barat. Observasi digunakan untuk mengamati lingkungan keluarga dan tempat dimana program tersebut dijalankan. Studi dokumentasi digunakan untuk menguatkan data-data tentang program inovasi yang dipraktikkan pemerintah.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari model analisis data Milles dan Huberman yang juga dikenal dengan sebutan analisis interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Dalam model analisis data tersebut terdapat tiga alur utama. Penelitian ini memodifikasi prosesnya melalui lima langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data dan validitas data melalui triangulasi (Moleong, 2017), penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Muhajir, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Lombok Barat dan *Stunting*.

Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Barat mempunyai laut, dataran rendah, dan juga pegunungan. Lombok Barat beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim penghujan. Lombok Barat mempunyai luas sawah 16.903 Ha yang menghasilkan bahan makanan dan lautnya juga menyimpan banyak ikan. Penduduk Lombok Barat berjumlah 731 ribu jiwa, dengan pekerjaan utama berada di sektor jasa (56,7 persen). Sektor pertanian menduduki mata pencaharian kedua dengan

prosentase 24,04 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2021b).

Kabupaten Lombok Barat mempunyai prevelensi angka *stunting* 20,7% pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 yang mencapai angka 49,7%. Pada tahun 2013 *stunting* di Lombok Barat sedikit mengalami penurunan di angka 46,89%, menurun lagi menjadi 33,61% pada tahun 2018, dan 20,7% pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 105,24 ribu jiwa atau 14,47 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2021a).

Penyebab Stunting. Cukup sulit untuk menentukan apa penyebab utama dari munculnya *stunting* di Lombok Barat. Hal ini karena *stunting* disebabkan oleh banyak faktor. Secara teoritis ada penyebab langsung berupa kurangnya asupan gizi dan juga penyebab tidak langsung seperti faktor pertumbuhan biologi ibu yang belum mencapai dewasa. Sampai saat ini Pemerintah Lombok Barat belum bisa memastikan apa penyebab Lombok Barat mempunyai angka *stunting* yang sangat tinggi pada tahun 2007. *Stunting* dapat disebabkan oleh karena faktor ekonomi, pola makan, "pola pikir", bahkan pernikahan di usia muda (budaya adat "merariq" atau kawin lari), ataupun bisa disebabkan karena penyakit.

Tingginya angka *stunting* bisa juga terjadi karena ketidakcermatan petugas ketika melakukan pengukuran. Oleh karena Pemerintah Lombok Barat tidak bisa memastikan faktor determinan penyebab *stunting* maka usaha untuk mengatasi *stunting* juga tidak dapat dilakukan hanya melalui satu cara saja. Untuk mengatasi *stunting* maka semua aspek harus diperbaiki. Tidak hanya pemerintah, keluarga yang putranya terkena *stunting* juga tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya.

Ketika peneliti bertanya kepada ibu yang anaknya mengalami *stunting*, ia mengatakan tidak tahu penyebabnya. Ia mengatakan anaknya sulit untuk makan, sedangkan untuk mencari lauk yang bervariasi dia tidak mempunyai uang yang cukup. Keterbatasan ekonomi menjadi faktor penyebab *stunting* di banyak keluarga. Namun informasi dari informan yang lain mengatakan bahwa anaknya makan tiga kali sehari, namun sejak lahir perkembangan badanya di bawah garis normal.

Jika dilacak lebih jauh kasus yang kedua ini terjadi karena pernikahan di bawah umur. Menurut teori kesehatan, usia kematangan dewasa seorang calon ibu sangat penting bagi pertumbuhan anak. Ketika hamil ada dua makhluk yang sama-sama masih membutuhkan

asupan, yaitu ibu dan anak. Jika tubuh ibu belum berkembang secara maksimal karena pernikahan yang terlalu dini maka asupan gizi untuk anak yang menyusui juga kurang maksimal. Akibatnya, meskipun bayi makan dengan normal, namun jika tidak didukung ASI yang baik pertumbuhannya bisa di bawah standar.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu kader posyandu, hampir semua ibu yang berat badan putranya berada di garis merah merasa malu dan terkejut ketika putranya dikatakan mengalami *stunting*. Mereka terkejut dan tidak tahu penyebab anaknya mengalami *stunting*. Mereka bahkan tidak mau mengambil makanan tambahan di desa. Ada juga informan yang bersikeras anaknya tidak mengalami *stunting*, padahal nampak tinggi badan dan berat badan anak tersebut berada di bawah standar, meskipun secara motorik lincah.

Terdapat juga anak yang masuk dalam daftar *stunting*, namun secara fisik anak tersebut tinggi dan gemuk. Peneliti tidak punya pretensi untuk mempertanyakan cara penimbangan. Meskipun demikian informan yang berasal dari aparat desa juga mempertanyakan validitas penimbangan. Banyak faktor yang membuat penimbangan tidak valid, mulai dari ketersediaan alat yang baik sampai kondisi psikologi penimbang. Apalagi honor para kader kesehatan yang menimbang bayi tersebut hanya seratus ribu rupiah setiap bulan.

Program Bantuan Sosial dan Stunting. *Stunting* dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kurangnya asupan gizi. Kurangnya asupan gizi identik dengan faktor kemiskinan. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar anak yang mengalami *stunting* berasal dari keluarga dengan status miskin. Kemiskinan identik dengan kekurangan makan. Meskipun demikian peneliti juga menemukan anak yang mengalami *stunting* tetapi tidak berasal dari keluarga miskin.

Hal ini terjadi di keluarga informan yang bekerja sebagai dokter gigi. Kasus *stunting* di keluarga yang secara ekonomi mampu juga terjadi, meskipun jumlahnya tidak banyak. Peneliti juga menemukan adanya keluarga dengan anak *stunting* yang tidak masuk dalam daftar keluarga miskin, padahal kondisi ekonominya serba kekurangan. Keluarga tersebut masih menumpang di rumah mertua, sang suami bekerja sebagai karyawan jasa *sparepart* perahu, sedangkan istrinya ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Informan ini mengalami putus sekolah di kelas dua SMK karena bapaknya meninggal sehingga tidak mempunyai biaya sekolah. Hal yang sama diceritakan oleh informan seorang ibu rumah

tangga yang mempunyai anak *stunting* dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun ia tidak masuk penerima bantuan pemerintah.

Pemerintah pusat mempunyai program bantuan untuk keluarga miskin, terutama untuk melindungi keluarga miskin agar tetap mampu mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Program tersebut bernama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan syarat atau dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.

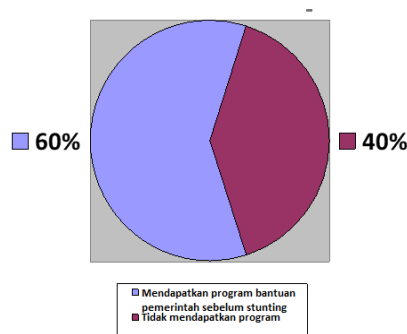
Program bantuan bersyarat merupakan bantuan yang hanya diberikan kepada keluarga miskin dengan peruntukan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada ibu hamil, anak balita. Bantuan diberikan ketika keluarga sasaran mampu memenuhi syarat tertentu, seperti memeriksakan kondisi kehamilan dan mengikutkan anak dalam kegiatan posyandu. Program ini diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk melindungi keluarga miskin agar asupan gizi ibu hamil dan balita terjaga sehingga keluarga tersebut sehat dan perkembangannya tidak terganggu. Untuk keluarga penerima manfaat yang mempunyai anggota ibu yang sedang hamil, anak balita, dan anak sekolah maka negara melalui PKH memberikan bantuan berupa uang tunai. Program ini juga mempunyai pendamping yang memantau dan memberi penyadaran kepada keluarga miskin agar alokasi dana bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika skema bantuan PKH ini dipraktikkan diharapkan tidak akan muncul *stunting*. Namun penelitian ini menemukan bahwa ada keluarga yang menjadi penerima manfaat Program PKH, namun anaknya masih mengalami *stunting*.

PKH memberikan bantuan dana sebanyak Rp2.400.000,- pertahun untuk keluarga miskin yang didalamnya ada ibu hamil dan Rp2.400.000,- pertahun untuk keluarga yang mempunyai anak usia dini. Dengan demikian selama satu bulan sebuah keluarga penerima bantuan PKH akan mendapat Rp200.000,- rupiah. Selain itu keluarga miskin masih mendapatkan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah.

Namun demikian jika dianalisis terkait kecukupan kebutuhan pokok maka bantuan Rp200.000 perbulan tidaklah cukup untuk menjamin kebutuhan gizi balita. Untuk membeli susu saja, uang Rp200.000,- hanya akan cukup untuk tiga minggu, belum untuk tambahan makanan yang lain. Apalagi garis kemiskinan di Lombok Barat di atas Rp466.4954,- per orang,

sedangkan bantuan pemerintah hanya Rp200.000,- setiap bulan.



Gambar 1. Persentase Stunting dan Program Pemerintah

Sumber: Data penelitian (2022)

Kondisi kekurangan materi keluarga penerima bantuan PKH ini nampak dari adanya anak balita yang diberi minum dari dot susu, namun isinya berwarna putih encer. Setelah dilakukan wawancara, ternyata anak tersebut sedang minum air tuba atau sering disebut air leri. Air tuba ini merupakan air yang berasal dari rebusan beras. Tentu kandungan gizinya tidak sama dengan susu, bahkan muncul pepatah *air susu dibalas dengan air tuba* untuk menunjukkan bahwa kualitas air tuba berbeda dengan kualitas susu.

Menurut informasi dari sang ibu, anaknya tidak terlalu suka dengan susu, meskipun ibu ini juga tidak pernah mencari alternatif rasa atau merk susu yang lain. Informan tersebut mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli susu bagi anaknya. Keluarga informan mengatakan bahwa ia sudah mengikuti program PKH lebih dari lima tahun yang lalu. Namun menurutnya bantuan PKH tidak cukup bisa memberi jaminan untuk memenuhi kebutuhan makan ia dan keluarganya secara penuh selama sebulan.

Informan ini mengatakan bahwa keuangannya selalu minus setiap bulan sehingga ia harus berhutang ke warung tetangga. Ibu informan menunjukkan catatan hutangnya di warung tetangga rumah. Setiap mendapatkan uang, baik itu dari upah atau bantuan pemerintah ia gunakan untuk menyicil hutangnya di warung. Informan tersebut mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Sedangkan suaminya merupakan tuna netra yang mengandalkan pekerjaannya dari upah pijat. Sebagai tukang pijat pendapatannya fleksibel, bahkan tidak setiap hari memperoleh pasien. Ketika diwawancarai informan menyampaikan sudah dua hari tidak mempunyai pasien. Berdasarkan data tersebut

uang bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada rumah tangga miskin belum bisa menjamin seratus persen kebutuhan pokok.

Pengarusutamaan Inovasi sebagai Kunci Penanganan *Stunting* di Lombok Barat. Persoalan tingginya angka *stunting* di Lombok Barat telah diketahui sejak tahun 2007. Namun setelah beberapa tahun persoalan tersebut tidak tertangani di Lombok Barat. Tidak terjadi penurunan angka *stunting* secara signifikan di Lombok Barat dari tahun 2007 sampai 2017. Baru pada tahun 2018, 2019, dan sampai saat ini angkanya dapat menurun secara signifikan.

Beberapa temuan penelitian menjelaskan penurunan *stunting* mempunyai korelasi dengan komitmen kepala daerahnya. Jika kepala daerah tidak menjadikan penanganan *stunting* sebagai prioritas maka angkanya sulit turun. Hal ini karena penanganan *stunting* membutuhkan kolaborasi banyak bidang (Palutturi et al., 2012; Suminar et al., 2021). Perubahan penurunan *stunting* di Lombok secara signifikan datanya seiring sejalan dengan perubahan bupati Lombok Barat. Kepala daerah yang baru menjadikan penurunan *stunting* sebagai prioritas pembangunan.

Hal ini sejalan dengan prioritas program pemerintah pusat untuk penurunan *stunting*. Sejak posisi Indonesia sebagai negara dengan *stunting* tinggi pemerintah mempunyai program prioritas. Pemerintah pusat juga mempunyai panduan dalam menyelesaikan permasalahan *stunting*. Model penanganan *stunting* di Lombok Barat dijalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Model yang digunakan adalah model komprehensif, dimana usaha penurunan angka *stunting* dimulai dari level kebijakan, yang kemudian diterjemahkan dalam gerakan, sampai ke program, dan kegiatan di setiap unit.

Penurunan angka *stunting* di Lombok Barat terjadi seiring dengan penetapan 100 kota/kabupaten prioritas untuk penanganan *stunting* pemerintah pusat pada tahun 2017. Fokus target pemerintah pusat ini diterjemahkan dengan baik oleh Bupati Lombok Barat yang baru dilantik. Mengikuti temuan penelitiannya Palutturi (2012) dan Suminar (2021) komitmen politik dari setiap kepala daerah menjadi asset yang sangat penting untuk mengatasi *stunting*. Jika kepala daerah mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengatasi *stunting*, akan diikuti pengalokasian anggaran yang cukup untuk program penurunan *stunting*. Namun jika kepala daerah tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi *stunting* maka angka *stunting* akan sulit turun (Palutturi et al., 2012; Suminar et al., 2021).

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, punya komitmen yang kuat untuk menurunkan angka

stunting. Ada banyak kebijakan yang dibuat untuk penanganan *stunting* sejak Lombok Barat masuk sebagai daerah prioritas penanganan *stunting* pemerintah pusat. Komitmen tersebut semakin menguat setelah bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 19A tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Aturan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi perintah atau "paksaan" setiap unit atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lombok Barat minimal harus mempunyai satu program khusus untuk penanganan *stunting*.

Kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan pengarusutamaan *stunting* dalam setiap program pembangunan. Pengarusutamaan program ini berfungsi untuk memastikan dan menggagal komitmen semua pegawai di Lombok Barat untuk bersama-sama memerangi *stunting*. Pengarusutamaan program tersebut menjadikan setiap pemimpin OPD dan stafnya berfikir kreatif untuk membuat program baru guna mengatasi *stunting*. Bupati memberikan perintah kepada setiap OPD wajib minimal membuat satu program baru untuk penurunan *stunting*.

OPD diberi kebebasan dan kreativitas untuk menterjemahkan perintah tersebut ke dalam programnya. Perintah tersebut memunculkan banyak program dengan nama unik, yang hanya ada di Lombok Barat di setiap OPD. Itulah yang dinamakan inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan kreativitas untuk membuat program (baru) guna memberikan solusi terhadap masalah sosial ataupun pengembangan asset. Inovasi sosial melahirkan perubahan sosial. Muncul delapan belas program di Kabupaten Lombok Barat untuk mengatasi *stunting* merupakan inovasi sosial yang lahir dari birokrasi pemerintahan.

Program inovasi sosial yang dibuat oleh OPD di Lombok Barat adalah Si Peka-Bu Siska dari Dinas Kesehatan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK) kerjasama Dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan. Selain itu ada Gardu Santun (Gerakan Terpadu Penuntasan *Stunting*) dari Dinas Kependudukan, Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek) dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gertak Pangan (Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu Berbasis Pekarangan) Dinas Ketahanan Pangan, Germawan (Gerakan Masyarakat Makan Makanan berprotein Hewani), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Dinas Sosial.

Muncul juga program yang dinamakan Gemadasi (Gerakan Masyarakat Sadar Gizi), HPK (Hari Pertama Kehidupan), Gerakan Aksi Bergizi

dari Dinas Kesehatan, SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat), Serbu Makar (Serentak Budayakan Masker dan Perubahan Karakter Menuju Tatanan Baru), Pugar (Peningkatan Usaha Garam Rakyat), Berpijak Sehat (Beriuk Pinak Jamban Sehat), Gerdu Jacket (Gerakan Terpadu Kejar Paket), Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), serta Gerdu Doa (Gerakan Terpadu Pemberdayaan Produk Lokal).

Delapan belas program terkait penanganan *stunting* menunjukkan bahwa penanganan *stunting* di Lombok Barat dilakukan secara terpadu di semua aspek. Penanganan langsung dengan pemberian makanan tambahan, seperti analisisnya Sebastien Mary, dkk (World Bank, 2007; Webb and Kennedy, 2014; Carletto *et al.*, 2015; Mary *et al.*, 2020), dipraktikkan Pemerintah Lombok Barat dalam program Gertak Pangan (Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu Berbasis Pekarangan), Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), serta pemberian makanan dari dana desa.

Perubahan pola berfikir masyarakat sebagai strategi penurunan angka *stunting*, seperti analisis penelitian (Ramadhan and Ramadhan, 2018; Muliani, Supiana and Hidayati, 2020; Salsabila, Putri and Damailia, 2021; Zaluchu, 2022), juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek) dan Serbu Makar (Serentak Budayakan Masker dan Perubahan Karakter Menuju Tatanan Baru). Perbaikan lingkungan juga dilakukan Pemerintah Lombok Barat dengan program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan Berpijak Sehat (Beriuk Pinak Jamban Sehat). Pemantuan kesehatan bayi juga dilakukan Pemerintah Lombok Barat dengan program Si Peka-Bu Siska (Sistim Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga).

Peraturan Bupati dan perintah pengarusutamaan penanganan *stunting* memacu setiap OPD kreatif untuk membuat program inovasi sosial, khas lokal Lombok Barat. Meskipun mempunyai nama unik, beberapa program sebenarnya merupakan perwujudan peniruan atau pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat. Meskipun demikian ada beberapa program di Lombok barat yang benar-benar baru pertama kali ada di Indonesia, seperti Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Kreativitas dalam menciptakan inovasi sosial penanganan *stunting* membuat Pemerintah Lombok Barat mendapat beberapa kali penghargaan, bahkan beberapa program ditiru dan dijadikan program nasional. Misalnya seperti program Si Peka-Bu Siska dari Dinas Kesehatan.

Berdasarkan data-data yang ada menunjukkan bahwa di Lombok Barat kreativitas dan inovasi sosial muncul karena perpaduan pendekatan *top down* dari bupati dengan *bottom up* dari OPD yang mengusulkan nama dan bentuk kegiatannya karena OPD-lah yang mengetahui kondisi lapangan dan ketersediaan anggaran. Namun demikian faktor *top down* berupa perintah dari bupati sebagai pimpinan birokrasi menjadi sangat menentukan. Masing-masing dinas harus mempunyai program untuk mengatasi *stunting*.

Tidak hanya sampai OPD di dinas yang ada di Lombok Barat, namun program tersebut menular ke desa dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah, serta media. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran dan programnya untuk penanganan *stunting*. Beberapa lembaga non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional juga terlibat dalam program penanganan *stunting* di Lombok Barat. Hal itu seperti Plan Internasional yang terlibat dalam program kolaborasi Gamak *Yes I do*. Ada juga Unicef yang bekerja dengan dinas kesehatan membuat kegiatan dengan pemberian suplemen tambah darah dalam program Gerakan Aksi Bergizi.

Pengarusutamaan *stunting* di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdampak pada fokusnya anggaran dan juga target sasaran untuk penurunan *stunting*. Munculnya inovasi-inovasi sosial tersebut menghiasi pemberitaan di surat kabar dan berita *online* sehingga wacana tentang perang melawan *stunting* ini sampai ke masyarakat (Hernawardi, 2019). Ruang publik masyarakat diwarnai berita-berita tentang *stunting* sehingga muncul komitmen masyarakat untuk terlibat dalam mensukseskan program pengurangan angka *stunting*.

Perkembangan wacana ini juga memberikan pemahaman baru di masyarakat akan bahaya *stunting* bagi masyarakat. Apalagi setiap peluncuran program penanganan *stunting*, bupati selalu mengerahkan banyak orang, melibatkan tokoh masyarakat, dihadiri semua kepala OPD, serta diliput banyak media. Seperti peluncuran program Germas yang dihadiri lebih dari 4.000 orang melakukan senam sehat dan diberitakan di beberapa media cetak dan *online*. Peliputan media ini menjadi penting karena media menjadi alat untuk menyebar gagasan dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan peniruan (Jaya, 2020).

Gerakan pengarusutamaan *stunting* memunculkan pengetahuan baru dan komitmen masyarakat untuk memerangi *stunting*. Pengetahuan baru dan komitmen tersebut menjadi fakta sosial yang memaksa orang untuk mematuhi dan memprioritaskan program

penanganan *stunting*. Bahkan muncul perasaan malu dari keluarga, dukuh, kepala desa, jika ada anak di wilayahnya yang mengalami *stunting*. Hal ini menyebabkan munculnya perhatian dan usaha lebih dari orang tua dan para pejabat untuk memberikan penanganan lebih agar anak di wilayahnya tidak mengalami *stunting*. Orang tua merasa malu jika ada anaknya mengalami *stunting*. Kondisi ini tentu jauh berbeda dibanding pada tahun 2007 atau 2013, ketika orang belum banyak mengetahui apa itu *stunting*. Bahkan di masa lalu mereka tidak menyadari kalau *stunting* merupakan masalah yang harus ditangani.

KESIMPULAN

Stunting disebabkan oleh banyak faktor. Penanganan yang hanya bersifat sektoral tidak akan mampu menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat menurunkan angka *stunting* secara signifikan karena menggunakan pendekatan menyeluruh atau lintas sektoral dengan cara mengarusutamakan penanganan *stunting* dalam pembangunan di setiap lembaga yang ada di kabupaten. Bupati menjadi aktor kunci dalam penurunan angka *stunting* karena bupati mempunyai kekuasaan birokrasi yang memaksa. Bupati memerintahkan setiap dinas mempunyai program inovasi sosial penurunan *stunting*. Dengan cara tersebut semua aspek yang menjadi faktor penyebab *stunting* diintervensi sehingga angka *stunting* dapat turun secara signifikan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa *stunting* dapat menimpa keluarga yang selama ini telah mendapatkan program bantuan perlindungan sosial dari pemerintah, baik itu berupa beras sejahtera, bantuan lauk pauk, mendapatkan dana PKH.

REKOMENDASI

1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan peningkatan nominal besaran bantuan PKH, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Saran ini muncul karena data di lapangan menunjukkan bahwa masih ada keluarga penerima manfaat program bantuan sosial yang mengalami *stunting*. Hal itu terjadi karena ketidakcukupan bantuan PKH untuk membeli susu dan juga mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Terutama keluarga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sama sekali.
2. Kementerian Sosial perlu membuat alur dan mensosialisasikan lebih massif terkait prosedur melapor jika ada keluarga miskin, namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat program bantuan. Rekomendasi ini

muncul karena ada keluarga yang secara ekonomi miskin, namun belum masuk penerima manfaat PKH. Di lapangan masih dijumpai keluarga miskin yang kebingungan kemana agar dirinya masuk dalam daftar keluarga miskin.

3. Pengarusutamaan program penurunan angka *stunting* di setiap unit. Daerah yang berkeinginan untuk mengatasi *stunting* wajib memerintahkan semua dinas atau satuan kerja mempunyai program untuk mengatasi *stunting*. Hal ini diperlukan karena *stunting* tidak disebabkan oleh satu faktor deterministik sehingga *stunting* tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu dinas, namun semua instansi minimal harus mempunyai satu program untuk mengatasi *stunting*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) UIN Sunan Kalijaga yang telah membiayai penelitian ini. Terima kasih kepada Izza, Nurlaela, mahasiswa UIN Mataram serta Institut Elkatarie yang ikut menemani dalam pengumpulan data di lapangan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan dari pemerintah dan masyarakat Lombok Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Aridiyah, F. O., Rohmawati, N. and Ririanty, M. 2015. 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)', *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1), 163-170.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. 2021a. *Indikator Kemiskinan 2019-2021*. Lombok Barat. [Online] Dari: <https://lombokbaratkab.bps.go.id/indikator/23/88/1/indikator-kemiskinan.html> [Diakses: 03 November 2022].

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. 2021b. *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Barat 2021*. Lombok Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

BPMI Setpres. 2022. Pemerintah Targetkan Angka Prevalensi Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024. Jakarta. [Online] Dari: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-targetkan-angka-prevalensi-stunting-di-bawah-14-persen-pada-2024/> [Diakses: 03 Desember 2022].

CAF. 2021. CAF World Giving Index 2021: A Global Pandemic Special Report. Charity Aid Foundation

- London. [Online] Dari: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf [Diakses: 03 Desember 2022].
- Carletto, G. et al. 2015. 'Farm-Level Pathways to Improved Nutritional Status: Introduction to the Special Issue', *The Journal of Development Studies*, 51(8), pp. 945-957. doi: 10.1080/00220388.2015.1018908.
- Casapía, M. et al. 2006. 'Parasite Risk Factors for Stunting in Grade 5 Students in a Community of Extreme Poverty in Peru', *International Journal for Parasitology*, 36(7), pp. 741-747. doi: 10.1016/j.ijpara.2006.03.004.
- Dimitrova, A. and Muttarak, R. 2020. 'After the floods: Differential impacts of rainfall anomalies on child stunting in India', *Global Environmental Change*, 64. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2020.102130.
- Edwards, B., Gray, M. and Borja, J. 2021. 'The Influence of Natural Disasters on Violence, Mental Health, Food Insecurity, and Stunting in the Philippines: Findings from a Nationally Representative Cohort', *SSM - Population Health*, 15. doi: 10.1016/j.ssmph.2021.100825.
- Hendriasyah, H. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hernawardi. 2019. Aksi Bergizi Cegah Stunting dan Angka Kematian Ibu di Lombok. Gatra Jakarta. [Online] Dari: <https://www.gatra.com/news-450452-Milenial-aksi-bergizi-cegah-stunting-dan-angka-kematian-ibu-di-lombok.html> [Diakses: 03 November 2022].
- Humas BKP. 2023. Angka Stunting Tahun 2022 Turun Menjadi 21,6 Persen, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. [Online] Dari: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/angka-stunting-tahun-2022-turun-menjadi-216-persen/> [Diakses: 25 Januari 2023].
- Ismawati, R. et al. 2020. 'Nutrition Intake and Causative Factor of Stunting Among Children Aged Under-5 Years in Lamongan City', *Enfermeria Clinica*, 30(4), pp. 71-74. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.10.043.
- Jaya, P. H. I. 2020. 'Media sosial, komunikasi pembangunan, dan munculnya kelompok-kelompok berdaya', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), pp. 166-178. doi: 10.24198/jkk.v8i2.16469.
- Mary, S. et al. 2020. 'Does Agricultural Aid Reduce Child Stunting?', *World Development*, 130, pp. 1-15. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.104951.
- Maryani, N. et al. 2019. 'Phylogeny and Genetic Diversity of the Banana Fusarium Wilt pathogen *Fusarium Oxysporum* f.sp. *Cubense* in the Indonesian centre of Origin', *Studies In Mycology*, 92, pp. 155-194. doi: 10.1016/j.simyco.2018.06.003.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Third edit. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Muliani, S., Supiana, N. and Hidayati, N. 2020. 'Kejadian dan Penyebab Stunting di Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2020', *JIKF*, 8(2), pp. 49-55. doi: 10.51673/jikf.v8i2.536.
- Palutturi, S. et al. 2012. 'Stunting in a Political Context: A Systematic Review', *Enfermeria Clinica*, 2(2), pp. 624-628. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.10.049.
- Ramadhan, R. and Ramadhan, N. (2018) 'Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh', *SEL Jurnal Penelitian Kesehatan*, 5(2), pp. 68-76.
- Rizal, M. F. and Doorslaer, E. Van. 2019. 'Explaining the Fall of Socioeconomic Inequality in Childhood Stunting in Indonesia', *SSM - Population Health*, 9. doi: 10.1016/j.ssmph.2019.100469.
- Rodin, D. 2015. 'Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an', *Economica*, VI(1), pp. 71-102.
- Salsabila, S. G., Putri, M. and Damailia, R. 2021. 'Hubungan Kejadian Stunting dengan Pengetahuan Ibu tentang Gizi di Kecamatan Cikur Lebak Banten Tahun 2020', *Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains (JKS)*, 3(1), pp. 100-103. doi: 10.29313/jiks.v3i1.7336.
- Sumarno and Zuraida, N. 2008. 'Pengelolaan Plasma Nutfah Tanaman Terintegrasi dengan Program Pemuliaan', *Buletin Plasma Nutfah*, 14(2), pp. 57-67.
- Suminar, J. R. et al. 2021. 'Sosialisasi Literasi Infomasi Kesehatan Bagi Ibu Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Wetan Kota Kab. Garut', *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 58-63.
- TNP2K. 2017. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Webb, P. and Kennedy, E. 2014. 'Impacts of agriculture on nutrition: nature of the evidence and research gaps', *Food and Nutrition Bulletin*, 35(1).
- World Bank. 2007. *From Agriculture to Nutrition: Pathways, Synergies and Outcomes Agriculture and Rural Development Department*. Washington D.C.: World Bank. doi: 10.1596/28183.

Zaluchu, F. 2022. 'Memahami Interaksi Stunting dan Otonomi Perempuan', *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 19(2), pp. 213-218.